

Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta)

Rusna Eva Linda^{1*}, Suryo Sakti Hadiwijoyo², Daru Purnomo³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas
Kristen Satya Wacana, Indonesia

Abstract

Gandeng Gendong Program is a program to solve the issue of poverty in the city of Yogyakarta. In the implementation of activities, the governance structure of the Gandeng Gendong program involves 5K which consists of the Village (Yogyakarta City Residents), Campus (Tridharma), Yogyakarta City Government, Corporate (private), and Community. The purpose of research is to analyze Multi-Party partnerships and the implementation of the Gandeng Gendong program in poverty reduction in the city of Yogyakarta. This research uses a descriptive qualitative method. The results of this study show that in Giddens' structural theory, the relationship between "Gandeng Gendong Program" and "5K" is a social practice. Especially if "Gandeng Gendong Program" is understood as a structure and "5K" as an agency. The Gandeng Gendong Program uses a structure of legitimacy that can be in the form of social norms, values and standards. The structure formed is an agreement in the form of an MoU and has forums and work mechanisms that have been stated in the Yogyakarta City Regent Regulation No.23/2018. The Gandeng Gendong program in poverty alleviation uses a Multi-Party Join Program collaboration. There is a collaborative relationship between 5K partners who run the Gandeng Gendong program. Implementation of the Gandeng Gendong Program through Nglarisi activities in Jogja Smart Service (JSS) for MSMEs providing food and beverages.

Keywords: *gandeng gendong, multi-stakeholder, poverty, yogyakarta*

Abstrak

Program Gandeng Gendong merupakan sebuah program untuk penyelesaian isu dari kemiskinan di Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan kegiatan struktur tata kelola Program Gandeng Gendong melibatkan 5K terdiri dari Kampung (Warga Kota Yogyakarta), Kampus (Tridharma), Pemerintahan Kota Yogyakarta, Korporasi (Swasta), dan Komunitas. Tujuan penelitian adalah menganalisis kemitraan Multi Pihak dan Implementasi Program Gandeng Gendong dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam teori strukturasi Giddens memiliki hubungan "Program Gandeng Gendong" dan "5K" adalah *social practice*. Terutama jika "Program Gandeng Gendong" dipahami sebagai struktur dan "5K" sebagai agensi. Program tersebut menggunakan struktur legitimasi berupa norma, nilai dan standar sosial. Ada struktur kesepakatan berupa MoU dan memiliki forum-forum serta mekanisme kerja yang tertuang dalam Perwal Kota Yogyakarta No.23 Tahun 2018. Program Gandeng Gendong menggunakan kerjasama Multi pihak *Join Program*. Program Gandeng Gendong merupakan hubungan kolaborasi antara mitra 5K yang menjalankan Program Gandeng Gendong. Implementasi Program Gandeng Gendong melalui kegiatan Nglarisi pada *Jogja Smart Service (JSS)* pada UMKM penyedia makanan dan minuman.

Kata kunci: *gandeng-gendong, kemiskinan, multi-stakeholder, yogyakarta*

* rusnaevaa@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu situasi atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan penduduknya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Priseptian & Priana Primandhana, 2022). Kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya di bidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya (Reza Attabiurrobbi Annur, 2013).

Strategi pengentasan kemiskinan telah berevolusi dari penciptaan lapangan kerja, adanya peningkatan pendapatan, adanya pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan hingga pemberdayaan masyarakat miskin. Strategi kemiskinan bisa dilakukan dalam jangka pendek dengan cara memindahkan sumber daya kepada kaum miskin dalam jumlah yang memadai (Rasbin, 2018). Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan rakyat, dan memperbaiki distribusinya, strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka

panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat (Jamil norzita. Hadijah siti, 2014).

Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan yang kedua membantu mereka yang mengalami kemiskinan parah dengan memberdayakan mereka dan mencegah timbulnya kemiskinan baru (Sari Wulandari et al., 2022).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2021 kondisi kemiskinan indonesia, Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Sementara itu, kondisi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri pada tahun 2021 ada sebanyak 506.450 orang.

Melihat kondisi kemiskinan di Kota Yogyakarta yang relatif masih tergolong tinggi, Pemerintah Kota berupaya untuk membuat inovasi-

inovasi program penanggulangan kemiskinan yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta. Strategi yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta yaitu dengan melakukan pengurangan beban pada masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (UMKM), serta membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11, 2019).

Strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah DIY adalah program reguler (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN). tambahan bantuan sosial oleh Kementerian Sosial. Program PEN (Prakerja, BPUM, dan BLT-DD) (Sumadi, 2022). Dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan pemerintahan melakukan evaluasi agar target dari penurunan kemiskinan bisa mencapai.

Program yang pada saat ini digunakan oleh pemerintah kota untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya salah satunya adalah Program Gandeng Gendong, dimana program ini melibatkan 5K yang terdiri dari

Kampung (Warga Kota Yogyakarta), Kampus (Tri Darma), Pemerintahan Kota Yogyakarta, Korporasi (Swasta), Komunitas yang saling bersinergi untuk mensukseskan program ini sesuai dengan perannya masing-masing yang telah diatur oleh Walikota. Program Gandeng Gendong diperkuat dengan 4 landasan hukum utama yaitu Peraturan Daerah No.11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, Rencana Strategis BAPPEDA Kota Yogyakarta tahun 2017-2022, Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2009 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta, dan Peraturan Walikota Tentang Program Gandeng Gendong No. 23 Tahun 2018. Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama antara *stakeholder* pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara *stakeholder* pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai

kapasitasnya (Peraturan Walikota No. 23, 2018).

Segoro Amarto dari Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan Inovasi Gandeng Gendong pada tahun 2018, yang merupakan perwujudan *smart city* dalam dimensi *smart society*. (Herjuna Rasyid & Suprajan, 2020). Konsep ini memotivasi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk berkolaborasi dan bekerja sama secara harmonis dengan semua pihak demi memajukan kesejahteraan warga kota (A. B. Nugraha & Angeningsih, 2022).

Program Gandeng Gendong bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dan mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam membantu sesama warga negara yang masih mengalami kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama masyarakat prasejahtera. Dalam berjalannya Program Gandeng Gendong juga bekerjasama dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk saluran dana untuk pemberdayaan kelompok masyarakat Kota Yogyakarta. Program bantuan dana CSR terbagi dalam tiga sektor yaitu penyedia sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Program Gandeng Gendong juga

memiliki aplikasi Nglarisi (agustinus B. Nugraha, 2022). Aplikasi Nglarisi diharapkan dapat mewujudkan tujuan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan, dengan memberdayakan masyarakat, khususnya anggota KMS (Kartu Menuju Sejahtera) (Wulan Dari et al., 2022).

Program Gandeng Gendong dibentuk dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan menanam dan mengembangkan nilai-nilai kerja sama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan (Jarlit, 2020). Berdasarkan jurnal penelitian pengentasan kemiskinan Sebelum pandemi Covid-19, Program Gandeng Gendong telah berhasil mengikutsertakan masyarakat secara bertahap. Pada masa pandemi Covid-19, Program Gandeng Gendong semakin dioptimalkan melalui pembentukan Forum Gandeng Gendong dan implementasi *master plan* di seluruh kelurahan. Filosofi panduan Program Gandeng Gendong menggunakan pendekatan jalan tengah yang menyeimbangkan antara sentralisasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan kerja sama lintas komunitas warga Kota Yogyakarta. (A. B. Nugraha & Angeningsih, 2022).

Pemberdayaan masyarakat melalui program Gandeng Gendong di Kelurahan Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Yogyakarta bahwa dalam pengentasan kemiskinan Program Gandeng Gendong berhasil dalam memberikan manfaat yang berupa tambahan pangsa pasar dan penghasilan masyarakat yang tidak mampu melalui anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota Yogyakarta (Miftakhul Iza & Dwi Astuti Nurhaeni, 2021). Dari penelitian yang dilakukan diatas membahas mengenai implementasi Program Gandeng Gendong dalam menanggulangi kemiskinan maka dalam penelitian ini akan menganalisis konsep *multi-stakeholder* pada Program Gandeng Gendong yang ada di Kota Yogyakarta serta melihat implementasi dari Program Gandeng Gendong. *Multi-stakeholder* adalah struktur tata kelola yang berusaha mempersatukan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam dialog, pengambilan keputusan dan pelaksanaan solusi dari suatu masalah atau tujuan bersama (Putri, 2021). pemangku kepentingan adalah bentuk kolaborasi yang bergantung pada persetujuan sukarela, kebutuhan bersama, persahabatan, dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dari berbagai lembaga, termasuk pemerintah, sektor

bisnis, masyarakat sipil, LSM, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan langsung terhadap isu yang sedang dikerjakan (Okitasari et al., 2020). *Stakeholder* adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan (Tresiana & Duadji,).

Melihat hubungan kerja sama Multi Pihak dari Program Gandeng Gendong dan dianalisis menggunakan teori Strukturasi dari Anthony Giddens. Teori Strukturasi dari Giddens menggambarkan corak pemikiran yang cenderung ontologis dibanding epistemologis (Dibina & Siahaan, 2015). Dijelaskan bahwa kata kunci dalam teori strukturasi yaitu ada “struktur” dan “agensi”. Menurut Anthony Giddens yang dimaksud dengan “struktur” adalah “*rules and resources*” yang dipakai pada produksi dan reproduksi sistem (Whittington, 2015). Berdasarkan pandangan Giddens dalam teori strukturasi yang menjadi pusat perhatian bukanlah hanya struktural dan bukan juga agensi tetapi juga “*Social Practices*” (Achmad, 2020). Berdasarkan pada pandangan Giddens yang menjadi struktur pada penelitian ini pusat perhatian berupa praktik sosial dan ada norma yang berlaku, maka dalam pembahasan ini yang menjadi

praktik sosial yaitu untuk mengatasi masalah kemiskinan (Royana Putri, 2013). Melihat permasalahan kemiskinan yang masih tergolong tinggi di Kota Yogyakarta maka pemerintah melakukan praktik sosial untuk mengurangi angka kemiskinan, pada Program Gandeng Gendong juga ada norma yang berlaku, nilai, regulasi serta mekanisme pelaksanaan. Dalam agensi Program Gandeng Gendong melibatkan 5 agensi yang terdiri dari Kampung, Kampus, Kota Yogyakarta, Korporasi dan Komunitas. Program Gandeng Gendong menggunakan peluang dari 5K membantu penyelesaian isu dari pengurangan kemiskinan Kota Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Sugiyono, 2018). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan kerjasama Kemitraan

Multi Pihak dalam penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan studi kasus Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, yang meliputi implementasi penanggulangan kemiskinan Program Gandeng Gendong di kota Yogyakarta dan analisis Kemitraan Multi Pihak dalam program penanggulangan kemiskinan Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta.

Unit amatan dalam penelitian ini adalah kerjasama lintas aktor kemitraan multipihak Program Gandeng Gendong, yang melihat kampung (masyarakat), kampus (Tridharma), pemerintahan Daerah (Pemerintah Kota Yogyakarta), Korporasi (Swasta), dan komunitas (Kelompok Masyarakat dari pekerja atau profesi). Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi multi pihak program Gandeng Gendong dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Yogyakarta.

Pengumpulan data pada penelitian dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan pertanyaan yang disiapkan dan dokumentasi penelitian ini berupa surat penting, arsip-arsip data serta gambar untuk melengkapi data penelitian. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teori strukturasi dari

Giddens yang menjelaskan bahwa kata kunci dalam teori strukturasi yaitu ada “struktur” pada Program Gandeng Gendong dan “agensi” pada Kampung, Kampus, Korporasi, Pemerintah Kota dan Komunitas. Kemudian dilakukan reduksi data dari hasil wawancara untuk mendapatkan hal-hal pokok dan penting. Setelah dilakukan reduksi data yang kemudian ditarik kesimpulan dan keputusan yang akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.
Angka Kemiskinan Kota Yogyakarta 2018-2021

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta			
	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	30.000	29.000	32.000	34.070

Sumber: BPS Kota Yogyakarta 2021

Diketahui jumlah penduduk miskin semakin meningkat dikarenakan oleh wabah virus Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga banyak orang yang kehilangan pekerjaan maupun usaha wiraswasta sehingga pendapatan menurun dan susah untuk mencari pekerjaan baru.

Kondisi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, atau gini ratio, masih terjadi di Kota Yogyakarta. Tingkat kemiskinan Kota Yogyakarta

Kemiskinan Kota Yogyakarta

Kemiskinan merupakan standar hidup umum dalam masyarakat yang berbeda, pada kenyataannya kemiskinan tidak hanya dikategorikan karena standar hidup rendah melainkan karena standar hidupnya lebih rendah daripada standar hidup orang lain, maka dari itu garis kemiskinan bisa berubah seiring dengan perkembangan ekonomi.

Kondisi kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 menduduki nomor 11 dengan angka kemiskinan terbanyak di Indonesia dengan persentase 11,91 %.

lebih rendah dibandingkan DIY, meskipun ketimpangannya lebih tinggi dibandingkan DIY. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta pada tahun 2021 Kecamatan Mergangsan memiliki tingkat angka kemiskinan paling tinggi yaitu sebanyak 6.361 jiwa, kedua ada Kecamatan Umbulharjo dengan 4.848 Jiwa dan yang ketiga Kecamatan Gondokusuman dengan 4.831 Jiwa. Kecamatan Mergangsan merupakan

Kecamatan yang terletak di bagian selatan Kota Yogyakarta dan kawasan yang dilintasi oleh sungai Code. Kecamatan Mergangsan merupakan pemukiman yang padat penduduk selain itu di Kecamatan Mergangsan sendiri memiliki wilayah yang digunakan sebagai perkantoran, kegiatan usaha, perhotelan dan juga masih terdapat tanah persawahan. Di Kecamatan Mergangsan sendiri terdapat 3 Bangunan Museum, 98 bangunan Hotel, 3 bangunan pasar permanen, dan 15 minimarket. Melihat kondisi pembangunan dan letak wilayah tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Mergangsan dipengaruhi oleh adanya kesenjangan pendapatan pada penduduk (Widodo, 2021).

Gandeng Gendong Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Program Gandeng Gendong merupakan program di tingkat Kota Yogyakarta yang memiliki tujuan sama seperti program penanggulangan kemiskinan lainnya dimana untuk mensejahterakan masyarakat. Program Gandeng Gendong hadir pada tahun 2018 dan masih ada sampai sekarang. Program Gandeng Gendong memiliki filosofi yang setara dengan bergandengan untuk menggendong masyarakat yang kurang mampu. Program Gandeng Gendong adalah

program kerjasama antara *stakeholder* pembangunan dan sebuah pedoman untuk semua kegiatan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara *stakeholder* pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya (Peraturan Walikota No. 23, 2018).

Program Gandeng Gendong hadir karena adanya kebutuhan, oleh sebab itu pemerintahan Kota Yogyakarta berusaha untuk semaksimal mungkin dalam membentuk Program Gandeng Gendong yang diharapkan bisa membantu masyarakat miskin dalam memperbaiki perekonomian keluarga.

Dalam penerapan Program Gandeng Gendong melibatkan 5K yang dimana Pemerintah Kota Yogyakarta mengembangkan kebijakan, merencanakan anggaran, mengimplementasikan program, serta memonitor dan mengevaluasinya. Korporasi berperan dalam mempromosikan dan memfasilitasi forum TSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan), serta

menggunakan dan menciptakan produk lokal. Peran masyarakat dalam implementasi dan sosialisasi program adalah melakukan konsolidasi inter dan intra komunitas. Melalui wadah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), kampus dan perguruan tinggi berperan dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia, khususnya pelaku UMKM dan litbang. Desa atau komunitas berperan sebagai pengembang dan pelaksana utama program.

Program Gandeng Gendong tidak hanya memberikan pelatihan dan penelitian tetapi juga mewadahi masyarakat dalam memasarkan produk yang telah diproduksi. Sebagai contoh hasil dari Program Gandeng Gendong yaitu ada di bidang kuliner dan produk kerajinan dimana ada kegiatan Nglarisi yang melalui *Jogja Smart Service* (JSS) yang terdapat kelompok-kelompok penyedia makanan dan minuman (Hasil Wawancara, Bagian Kesra Setda, Kota Yogyakarta, 4 April 2023). Aplikasi JSS (*Jogja Smart Service*) mencakup layanan Nglarisi. Sebagai bagian dari Program Gandeng Gendong, Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan aplikasi JSS untuk memesan nasi kotak dan makanan ringan untuk rapat. Pada tahun 2019-2021 sudah terbentuk 253

kelompok Nglarisi (BAPPEDA Yogyakarta, 2021).

Penerapan kolaborasi Gandeng Gendong dalam 5K juga saling bekerjasama dalam merancang *master plan* untuk setiap kelurahan sehingga sudah memiliki rancangan kerja untuk 5 tahun kedepan. Pembuatan *Masterplan* di kelurahan berbeda antara kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain dimana menyesuaikan dengan potensi dari daerah masing (Hasil Wawancara Bidang Penelitian Pengembangan, Inovasi dan Pengendalian BAPPEDA, Kota Yogyakarta, 19 April 2023).

Dalam implementasi Program Gandeng Gendong tidak semuanya terlaksanakan dengan optimal pada Kelurahan. Seperti di Kelurahan Wirobrajan masyarakat merasa Program Gandeng Gendong yang berjalan terlihat tidak sesuai dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Kenyataan pada lapangan penerapan Program Gandeng Gendong masih sering ditemukan usaha yang tidak melibatkan tenaga warga KMS yang sudah mengikuti pelatihan. Tetapi pada Kelurahan Terban Penanggulangan kemiskinan melalui Program Gandeng Gendong sudah cukup terlaksanakan dengan baik karena pada penerapannya sudah memberikan perbedaan pada masyarakat miskin dan terdampak Covid

19 (Hasil Wawancara, TKPK Kelurahan Wirobrajan dan Kelurahan Terban, Kota Yogyakarta, 11 Juli 2022).

Kemitraan Multi Pihak Melalui Program Gandeng Gendong

Stakeholder pembangunan adalah pemangku kepentingan pembangunan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan Program Gandeng Gendong yang meliputi Pemerintah Daerah (Kota), Korporasi (Swasta), Kampus (Perguruan Tinggi), Komunitas dan Kampung (masyarakat).

Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama antara *stakeholder* pembangunan dan sebuah pedoman untuk semua kegiatan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara *stakeholder* pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua *stakeholder* sesuai kapasitasnya (Peraturan Walikota No. 23, 2018).

Nugraha & Angeningsih (2022) dalam penelitiannya Sebelum pandemi Covid-19, Program Gandeng Gendong

telah berhasil mengikutsertakan masyarakat secara bertahap. Pada masa pandemi Covid-19, Program Gandeng Gendong semakin dioptimalkan melalui pembentukan Forum Gandeng Gendong dan implementasi *master plan* di seluruh kelurahan. Pada hasil penelitian ini Filosofi panduan Program Gandeng Gendong menggunakan pendekatan jalan tengah yang menyeimbangkan antara sentralisasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan gotong royong dari penduduk setempat. Sedangkan, Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulan (2022). Pengimplementasian pada pengentasan kemiskinan Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Standar Operasional Prosedur (SOP), pelibatan pelaku media massa, dan pembentukan badan yang bertugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan para pelaku yang berpartisipasi dalam Program Gandeng Gendong merupakan beberapa hal yang masih harus ditingkatkan. Untuk melengkapi dua penelitian diatas maka pada penelitian ini melihat mekanisme pengentasan kemiskinan menggunakan kemitraan multi pihak pada Program Gandeng Gendong menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens.

Program Gandeng Gendong merupakan sebuah inovasi yang digunakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai wadah praktik sosial untuk membantu masyarakat Kota Yogyakarta dalam mengembangkan usaha UMKM dan potensi dari setiap Kemantren di Kota Yogyakarta.

Pola relasi Program Gandeng Gendong mengikuti argumentasi Giddens. Menurut Giddens, hubungan “Program Gandeng Gendong” dan “5K” adalah *social practice*. Terutama jika “Program gandeng Gendong” dipahami sebagai struktur dan “5K” sebagai agensi. Selain melihat praktik sosial dalam teori strukturasi Giddens, pada penelitian ini menggunakan struktur legitimasi yang bisa berupa norma, nilai dan standar sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasi Kesejahteraan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta bahwa Program Gandeng Gendong merupakan Kemitraan Multi Pihak yang memiliki bentuk kerja sama yang tertuang pada Peraturan Walikota No. 23 tahun 2018, yang berlandaskan kesepakatan yang memiliki tujuan dalam menurunkan angka kemiskinan Kota Yogyakarta yang pemangku kepentingan berasal dari Kampus, Kampung, Korporasi, Kota dan Komunitas. Dalam kemitraan multi

pihak Program Gandeng Gendong setiap pemangku kegiatan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dan saling berkoordinasi serta menanggung risiko secara bersama-sama dan menggabungkan sumber daya manusia, finansial, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk memaksimalkan potensi dalam mencapai tujuan bersama. Program Gandeng Gendong juga memiliki *memorandum of understanding* (MoU) dalam kerjasama yang berkaitan dengan penelitian dan pelatihan. Program Gandeng Gendong juga memiliki forum bersama *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang terdiri dari pengusaha-pengusaha dan perusahaan yang ada di Kota Yogyakarta. (Hasil Wawancara, Bagian Kesra Setda, Kota Yogyakarta, 4 April 2023).

Program Gandeng Gendong merupakan kerjasama *Multi Stakeholder* bergaya *Join Program* dimana Program Gandeng Gendong merupakan hubungan kolaborasi antara mitra-mitra seperti Kampung, Kampus, Kota Yogyakarta, Korporasi dan Komunitas yang menjalankan Program Gandeng Gendong dalam mengimplementasikan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Dalam berdirinya kerjasama *Multi Stakeholder* Gandeng Gendong terdapat struktur yang

disepakati dimana secara regulasi ada Peraturan Walikota yang menjelaskan tugas, peran dan fungsi dari setiap pemangku kegiatan yang ada pada Program Gandeng Gendong.

Dalam mencapai keberhasilan strategi pelaksanaan Program Gandeng Gendong menggunakan strategi kolaborasi yang partisipatif, adanya struktur kelembagaan formal tetapi tetap fleksibel dan sederhana, serta fokus pada penyelesaian program secara lebih efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Dinamika kolaborasi berjalan cukup baik dengan terpenuhinya aspek dalam dinamika kolaboratif yakni adanya keterlibatan berprinsip antar *stakeholder*, motivasi bersama yang cukup kuat, serta pemenuhan kapasitas aksi bersama yang memiliki tantangan dalam memaksimalkan distribusi pengetahuan dan sumber daya.

Dalam menerapkan analisis teori Strukturasi Giddens tidak hanya melihat pada struktur tetapi juga agensi maka dalam Penerapan Program Gandeng Gendong memiliki Agensi. Jika Program Gandeng Gendong sebagai struktur yang menggandeng semua upaya dalam penanggulangan kemiskinan di kota Yogyakarta maka dalam penerapan Program Gandeng Gendong 5K sebagai

agensi memiliki hak untuk menyampaikan perubahan, perubahan yang dimaksud ialah model interaksi dengan lingkungan maupun dalam pengambilan keputusan. 5K sebagai agensi memiliki peran dan tugas tersendiri, seperti:

Kampung, adalah kawasan wilayah atau masyarakat warga Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran kegiatan Gandeng Gendong agar bisa lebih berdaya, meningkat kesejahteraannya dan maju. Dalam implementasi sebagai agensi kampung melaksanakan pendataan pada masyarakat yang kurang mampu, melakukan pemetaan potensi serta memberikan usulan atau penataan usaha kecil, melakukan pendampingan pada usaha kecil, melaksanakan promosi sesuai dengan potensi wilayahnya. Kampung sebagai agensi melakukan koordinasi antar kampung dalam satu wilayah dan yang membantu pelaksanaan Program Gandeng Gendong secara teknis. Dalam pengumpulan data laporan penanggung jawab banyak usaha yang terlambat menyerahkan laporan tersebut sehingga menghambat pemantauan dan monitoring oleh pemerintah Kota. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kelurahan banyak masyarakat dalam mengembangkan usaha UMKM merasa kesulitan dalam

menemukan inovasi baru sehingga usaha yang dijalankan kelihatan monoton (Hasil Wawancara TKPK Kelurahan Ngampilan, Kota Yogyakarta, 19 Juli 2022).

Kampus, atau perguruan tinggi adalah Institusi pendidikan tinggi negeri dan swasta yang menjalankan program Tridharma untuk pemberdayaan masyarakat dan mendapat pengakuan hukum dari pemerintah Indonesia dianggap sah. Implementasi Kampus sebagai agensi yaitu melakukan pengembangan kemampuan pengembangan usaha kecil masyarakat dan sumber daya manusia desa; pelatihan dan pendampingan dalam manajemen, pemasaran, dan produksi perusahaan kecil, melakukan evaluasi dan monitoring dalam produksi, pemasaran, manajemen usaha kecil dan mikro di masyarakat dan kampung, melaksanakan studi potensi lokal untuk pengembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kampung, melaksanakan studi untuk pengembangan pangsa pasar lokal, regional dan internasional. Kampus juga memfasilitasi kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menyalurkan dana dan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, dalam rangka pemberdayaan

masyarakat kota Yogyakarta. Dalam melakukan kegiatan pelatihan oleh Kampus tidak semua masyarakat berminat untuk mengikuti pelatihan karena masyarakat yang sudah terbiasa menerima bantuan dari pemerintah sehingga sulit untuk dilepaskan (Hasil (Hasil Wawancara TKPK Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, 11 Juli 2022).

Pemerintahan Kota Yogyakarta, dalam implementasi sebagai agensi membantu pelaksanaan Program Gandeng Gendong dengan membentuk forum Gandeng Gendong di tingkat kota yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk memutuskan program tahunan dan *roadmap* kegiatan. Dalam hal ini BAPPEDA memiliki peran untuk melakukan koordinasi dan sinergitas pada kegiatan maupun anggaran Program Gandeng Gendong bersama Organisasi Perangkat Daerah. Selain BAPPEDA Kasi Kesejahteraan juga memiliki peran dalam menyusun sebuah kebijakan yang kemudian akan diserahkan kepada Sekretaris daerah untuk diambil keputusan yang eksekusinya akan dilakukan oleh bagian Dinas selaku unit kerja (Suwarna, 2023). Dalam hal ini Pemerintah daerah menyusun peluang dari potensi daerah dan mengarahkan kelompok sasaran Program Gandeng Gendong sesuai

dengan potensi daerah tersebut. Pemerintah Kota juga melakukan *monitoring* kegiatan dan catatan secara berkala pada pelaksanaan Program Gandeng Gendong (Akib et al., 2023).

Korporasi atau swasta, adalah Perusahaan atau lembaga swasta yang menjalankan bisnis untuk mencari keuntungan dan peduli terhadap lingkungan dapat menggunakan dana CSR atau dana lainnya dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi warga Kota Yogyakarta. Implementasi Korporasi sebagai agensi adalah Memanfaatkan tenaga kerja lokal dan mengutamakan dalam bisnis atau kegiatan, menggunakan produk usaha kecil lokal, mempromosikan dan memasarkan produk usaha kecil, memberikan dukungan pada program pemerintah yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, dan menjalin kerja sama dengan usaha kecil di wilayah tersebut. Kelurahan harus dapat menggunakan lembaga pemangku di wilayah Kelurahan karena tidak semua Kelurahan memiliki Korporasi di Kecamatan. (Hasil Wawancara TKPK Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, 11 Juli 2022).

Komunitas, adalah kelompok masyarakat dari kumpulan pekerja atau profesi, kumpulan hobi dan minat, dan

atau kumpulan pengamat masalah sosial, ekonomi dan seni-budaya, dan atau perkumpulan lainnya yang mempunyai kepedulian untuk membantu masyarakat. Implementasi komunitas sebagai agensi memberikan wadah, asosiasi, forum usaha kecil dalam pengembangannya, melakukan konsolidasi antar komunitas. Komunitas juga melakukan usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha kecil, melakukan promosi dan pencantuman Logo Gandeng Gendong pada setiap kemasan produk yang termasuk dalam Program Gandeng Gendong, kerja sama dengan pihak-pihak terkait, dan partisipasi aktif dalam sosialisasi Program Gandeng Gendong. Perkumpulan komunitas bisa dari berbagai kalangan dan profesi sehingga pada saat melakukan pendampingan kepada masyarakat harus berkoordinasi yang baik tetapi pada kenyataannya masih sering adanya masalah pada koordinasi bersama dengan pihak pemerintah Kota dan Sekretaris daerah. Pada forum komunitas yang sudah memiliki Surat Keputusan yaitu komunitas Chef, *Guide* lokal, Fotografi, dan pecinta lingkungan. Dari hasil wawancara dalam implementasinya adanya kekurangan minat oleh masyarakat sehingga sumber daya manusia yang kurang mempengaruhi

gagasan atau inovasi baru dalam komunitas yang terbentuk (Hasil Wawancara TKPK Kelurahan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, 11 Juli 2022).

KESIMPULAN

Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama antara *stakeholder* pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian di antara *stakeholder* pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan. Program Gandeng Gendong memiliki bentuk kerja sama yang tertuang pada peraturan Walikota Kota Yogyakarta No. 23 Tahun 2018. Pola relasi Program Gandeng Gendong, 5K dalam teori strukturasi Giddens memiliki hubungan “Program Gandeng Gendong” dan “5K” adalah *social practice*. Terutama jika “Program gandeng Gendong” dipahami sebagai struktur dan “5K” sebagai agensi. Dalam penerapannya program Gandeng Gendong memiliki 5 Agensi yang meliputi Pemerintah Daerah (Kota), Korporasi (Swasta), Perguruan Tinggi (kampus), Komunitas dan Kampung (masyarakat) dimana dalam 5 agensi yang memiliki perannya masing. Dalam Program Gandeng Gendong

menggunakan struktur legitimasi yang bisa berupa norma, nilai dan standar sosial. Pada Program Gandeng Gendong struktur yang dibentuk adanya kesepakatan berupa MoU dan memiliki forum-forum serta mekanisme kerja yang sudah tertuang dalam Perwal Kota Yogyakarta No.23 Tahun 2018. Program Gandeng Gendong memiliki kegiatan Nglarisi yang melalui *Jogja Smart Service (JSS)* yang terdapat kelompok-kelompok penyedia makanan dan minuman. Program Gandeng Gendong merupakan sebuah inovasi pengentasan kemiskinan yang menggunakan konsep kemitraan Multi Pihak yang menggunakan model *Join Program* dimana Program Gandeng Gendong merupakan hubungan kolaborasi antara mitra-mitra seperti Kampung, Kampus, Pemerintah Kota Yogyakarta, Korporasi dan Komunitas yang menjalankan Program Gandeng Gendong dalam mengimplementasikan penanggulangan kemiskinan di Kota Yogyakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya tujuikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra) Kota Yogyakarta, serta seluruh pihak yang sudah bersedia menjadi narasumber dan membantu saya

pada penelitian ini.

REFERENSI

- Achmad, Z. A. (2020). Anatomi Teori Strukturasi dan Ideologi Jalan Ketiga Anthony Giddens Anatomy of Structuration Theory And Ideology of The Third Way Of Anthony Giddens. In *Jurnal Translitera*, 9(2).
- BAPPEDA Yogyakarta. (2021). Final Laporan Akhir Nglarisi.
- Dibina, Y., & Siahaan, H. (2015). Tugas Matakuliah Penunjang Desertasi Teori Anthony Giddens Dan Teori Strukturasi.
- Herjuna Rasyid, & Drs. Suprajan, M. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Gandeng Gendong di Kelurahan Cokrodingrat, Kecamatan Jetis, Yogyakarta (Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta).
- Jamil, N, & Hadijah, S. (2014). Realiti Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 48(1), pp. 167–177.
- Jarlit, J. (2020). Dewan Redaksi Bappeda Kota Yogyakarta. www.bappeda.jogjakota.go.id
- Iza, S. M., & Nurhaeni, I. D. A. (2021). Proses Kolaborasi dalam Penanganan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Gandeng Gendong di Yogyakarta. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 1(2), pp. 365-379.
- Nugraha, A. B., & Angeningsih, L. R. (2022). Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Gandeng Gendong di Kota Yogyakarta. *The Journalish: Social and Government*, 3(3), pp. 160–169. <https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.266>
- Nugraha, A, B. (2022). Program Gandeng Gendong Sebagai Model Pengentasan (Tesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD, Yogyakarta).
- Okitasari, M., Prabowo, M. H., & Santono, H. (2021). Multi-stakeholder partnerships: A tangible instrument to support the implementation of the 2030 agenda at the local level. *Social Development Issues*, 42(3), pp. 61-86.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11, 2019. (2019). Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Walikota No. 23. (2018). Peraturan Walikota Yogyakarta No 23 Tahun 2018 Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.
- Priseptian, L., & Priana Primandhana, W. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. *Forum Ekonomi*, 24(1), pp. 45–53. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI>
- Aulia, A. P. N. (2021). Analisis Model Multi Stakeholders Governance Body dalam Merumuskan Kebijakan dan Program Pembangunan.
- Rasbin, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran: Studi di Kota Yogyakarta Dan Malang. *Kajian*, 23(2), pp. 129-142.
- Annur, R. A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di kecamatan jekulo dan mejobo kabupaten kudu tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Putri, G. R. (2013). *Analisis Teori Strukturasi Pada Proses Pembentukan Pandangan, Pemahaman dan Minat Terhadap*

- Profesi Pustakawan (Studi Etnometodologi tentang Profesi Pustakawan di Kalangan Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga)* (Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya).
- Wulandari, S., Dasopang, A. P., Rawani, G. A., Hasfizetty, I., Sofian, M. Y., Dwijaya, R., & Rachmalija, S. (2022). Kebijakan Anti Kemiskinan Program Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), pp. 3209-3218.
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif* (2018th ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, P. (2022). *Strategi Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi DI Yogyakarta*. Disampaikan pada Forum Pembangunan Daerah (FPD) “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Pemulihan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan & Ketimpangan Pasca Pandemi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.
- Tresiana, N., & Duadji, D. N. (2016). Model Multi Stakeholders Governance Body Dalam Mewujudkan Kebijakan Publik Yang Unggul.
- Whittington, R. (2015). Giddens, Structuration Theory and Strategy As Practice. *Cambridge Handbook of Strategy as Practice, Second Edition* (pp. 145–164). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CCO9781139681032.009>
- Widodo, K. (2021). Kecamatan Mergangsan Dalam Angka 2021 (Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, Ed.). BPS Kota Yogyakarta.
- Dari, D. W., Apriliyani, D. D., & Handayani, W. (2022). Implementasi Pengentasan Kemiskinan di Kota Yogyakarta Berbasis Tata Kelola Kolaboratif dalam Program Gandeng Gendong. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(1), pp. 1-8. <https://doi.org/10.31289/publika.v10i1.6545>